



Katalog BPS: 3101021.82

STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi Oktober 2017



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi Oktober 2017



STATISTIK PROVINSI MALUKU UTARA

Edisi Oktober 2017

No. Publikasi: 82560.1710

Katalog BPS: 3101021.82

Ukuran Buku: 20 x 14 cm

JumlahHalaman: v + 40 halaman

Naskah:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Gambar Kulit:

Bidang Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik

Diterbitkan oleh:

© Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengkomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

Kata Pengantar



Publikasi Statistik Provinsi Maluku Utara edisi Oktober 2017 merupakan publikasi triwulanan berupa booklet yang berisi data dan informasi yang dihasilkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Maluku Utara. Publikasi ini diterbitkan sebagai ringkasan terhadap data-data statistik yang telah dipublikasikan oleh BPS Provinsi Maluku Utara, di antaranya yaitu melalui Berita Resmi Statistik.

Semoga dengan terbitnya publikasi ini, dapat memberikan informasi yang cepat dan tepat kepada pemerintah, swasta, akademisi dan masyarakat luas. Saran dan kritik yang membangun sangat diharapkan untuk perbaikan dan penyempurnaan publikasi selanjutnya.

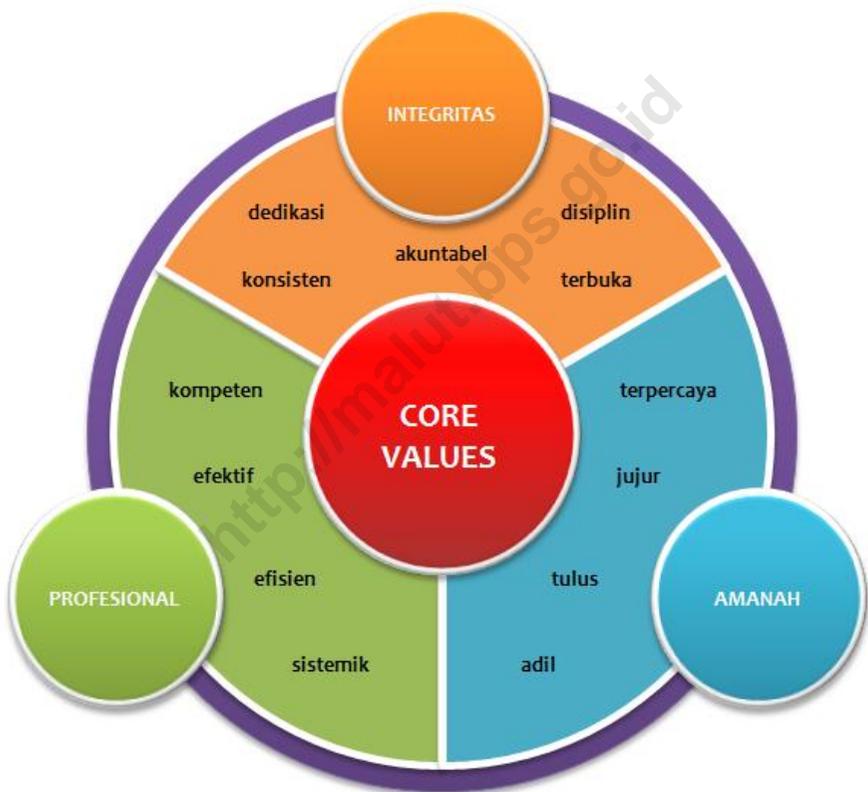
Akhirnya, saya mengucapkan terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi hingga terbitnya publikasi ini.

Ternate, Oktober 2017
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Maluku Utara



Drs. Misfaruddin, M.Si.

NILAI INTI BPS (BPS Core Values)



DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Nilai Inti BPS	iv
Daftar Isi	v
Kewilayahan	1
Penduduk	3
Ketenagakerjaan	6
Kemiskinan	10
Gini Ratio	13
Industri Manufaktur	14
Indeks Harga Konsumen Dan Inflasi	17
Ekspor Dan Impor	19
Nilai Tukar Petani	22
Pariwisata	25
Produk Domestik Regional Bruto	28
Indeks Tendensi Konsumen	34
Indeks Pembangunan Manusia	35
Indeks Pembangunan Gender	38
Indeks Demokrasi Indonesia	39

KEWILAYAHAN

Jumlah Kecamatan dan Desa/Kelurahan/UPT Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan/UPT
(1)	(2)	(3)
Halmahera Barat	8	170
Halmahera Tengah	10	63
Kepulauan Sula	12	78
Halmahera Selatan	30	256
Halmahera Utara	17	199
Halmahera Timur	10	104
Pulau Morotai	5	88
Pulau Taliabu	8	71
Ternate	7	77
Tidore Kepulauan	8	90
Maluku Utara	115	1.196

Sumber: Direktori Desa Provinsi Maluku Utara Semester 1 2017

Indikator Kewilayahan Provinsi Maluku Utara Tahun 2014

Rincian	Persentase
(1)	(2)
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di tepi laut	78,68
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di dalam hutan	2,09
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang terletak di sekitar hutan	48,08
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang tidak memiliki SD/MI	8,70
- Persentase kecamatan yang memiliki Puskesmas/Puskesmas Pembantu	100,00
- Persentase kecamatan yang memiliki pasar dengan bangunan (baik permanen maupun semi permanen)	50,43
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang telah ada keluarga pengguna listrik yang disalurkan oleh PLN	65,64
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang belum memiliki penerangan di jalan utama	62,12
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang hanya menggunakan sarana transportasi air	12,71
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang hanya menggunakan sarana transportasi darat	51,00
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang dapat menggunakan sarana transportasi baik darat maupun air	36,29
- Persentase desa/kelurahan/UPT yang dapat menggunakan sarana transportasi darat dan memiliki kondisi jalan yang tidak dapat dilalui kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau lebih sepanjang tahun	14,75

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes) 2014

Indeks Kesulitan Geografis Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2014

Kabupaten/Kota	IKG Desa		
	Terendah	Nilai Tengah	Tertinggi
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	23,74	48,56	82,75
Halmahera Tengah	26,98	44,81	72,44
Kepulauan Sula	22,01	51,08	81,92
Halmahera Selatan	19,71	61,21	84,79
Halmahera Utara	17,05	47,67	82,04
Halmahera Timur	14,33	48,81	78,43
Pulau Morotai	18,84	52,62	82,69
Pulau Taliabu	32,78	70,17	85,20
Ternate	-	-	-
Tidore Kepulauan	17,33	44,24	69,70
Maluku Utara	14,33	51,69	85,20

Sumber: Pendataan Potensi Desa/Kelurahan (Podes) 2014

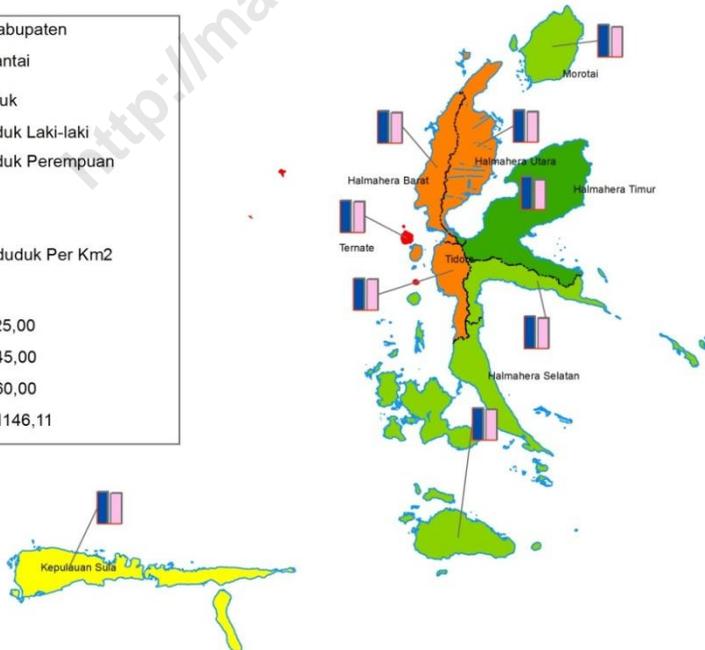
- Beberapa indikator kewilayahan bisa dilihat dari data Pendataan Potensi Desa (Podes).
- Pendataan Podes dilaksanakan 3 (tiga) kali dalam 10 tahun, Podes terakhir yaitu Podes 2014 dilaksanakan pada bulan April 2014.
- Indeks Kesulitan Geografis (IKG) merupakan indeks komposit yang mempunyai skala dari 0 (nol) sampai 100 (seratus) dan disusun oleh tiga komponen, yaitu: 1) ketersediaan pelayanan dasar (pendidikan dan kesehatan), 2) kondisi infrastruktur, dan 3) aksesibilitas/transportasi. Semakin besar IKG menunjukkan tingkat kesulitan geografis yang semakin tinggi pada wilayah desa tersebut.

PENDUDUK

Jumlah Penduduk Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Maluku Utara

Kabupaten/Kota	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Halmahera Barat	104 807	106 791	108 769	110 717	112 722
Halmahera Tengah	45 712	47 079	48 414	49 807	51 315
Kepulauan Sula	89 374	91 406	93 435	95 285	97 177
Halmahera Selatan	207 728	211 682	215 791	219 836	223 460
Halmahera Utara	169 599	173 117	176 573	180 100	183 596
Halmahera Timur	78 112	80 526	82 914	85 188	87 680
Pulau Morotai	55 998	57 565	59 102	60 727	62 412
Pulau Taliabu	48 880	49 510	50 067	50 709	51 316
Ternate	197 566	202 728	207 789	212 997	218 028
Tidore Kepulauan	93 299	94 493	95 813	96 979	98 206
Maluku Utara	1 091 075	1 114 897	1 138 667	1 162 345	1 185 912

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara



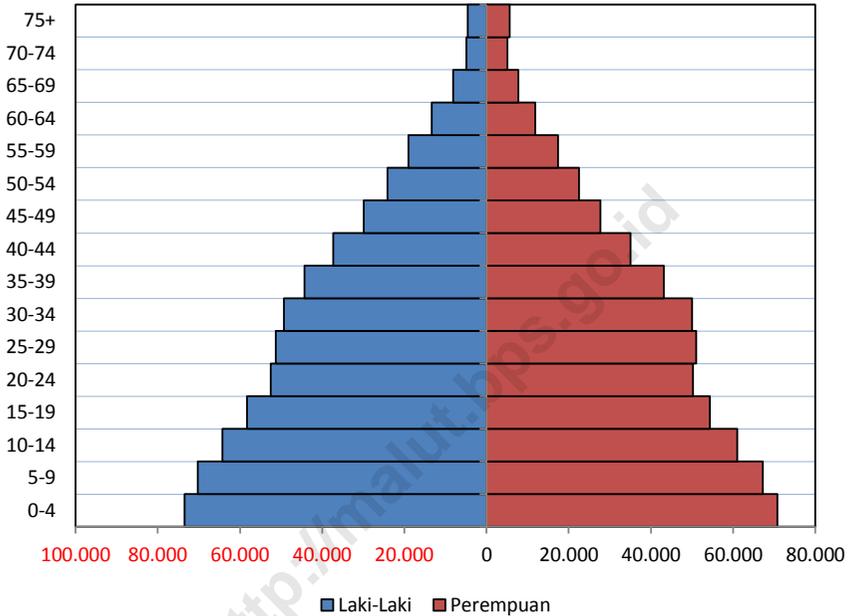
Jumlah Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2016

Kelompok Umur	Jumlah Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
0-4	73 458	70 757	144 215
5-9	70 260	67 231	137 491
10-14	64 272	61 057	125 329
15-19	58 302	54 350	112 652
20-24	52 553	50 300	102 853
25-29	51 309	51 056	102 365
30-34	49 334	49 984	99 318
35-39	44 294	43 187	87 481
40-44	37 331	35 016	72 347
45-49	29 898	27 686	57 584
50-54	24 060	22 493	46 553
55-59	19 036	17 387	36 423
60-64	13 310	11 840	25 150
65-69	8 178	7 736	15 914
70-74	4 906	5 096	10 002
75+	4 567	5 668	10 235
Jumlah	605 068	580 844	1 185 912

Sumber: Proyeksi Penduduk Provinsi Maluku Utara

- Penduduk adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami suatu wilayah dalam teritorial Negara Republik Indonesia selama 6 (enam) bulan atau lebih, atau kurang dari 6 (enam) bulan tetapi bermaksud menetap lebih dari 6 (enam) bulan.

**Piramida Penduduk Provinsi Maluku Utara
Tahun 2016**



KETENAGAKERJAAN

Penduduk Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Kegiatan Utama (ribu orang)

Jenis Kegiatan Utama	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Penduduk Usia Kerja (15 tahun ke atas)	773,2	782,4	792,5	801,9
2. Angkatan Kerja	513,6	530,7	524,5	557,1
Bekerja	482,5	512,5	503,5	530,3
Penganggur	31,1	18,2	21,0	26,8
3. Bukan Angkatan Kerja	259,6	251,7	268,0	244,7
4. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	66,43	67,8	66,2	69,48
5. Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	6,05	3,4	4,0	69,31
6. Pekerja tidak penuh	197,2	179,5	145,7	69,55
Setengah Penganggur	74,0	58,2	36,4	84,56
Paruh Waktu	123,2	121,3	109,3	53,77

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama (ribu Orang)

Lapangan Pekerjaan Utama	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian	242,4	225,2	205,5	234,0
2. Pertambangan dan Penggalian	11,9	20,8	14,0	15,9
3. Industri	17,4	26,4	44,5	36,2
4. Listrik, Gas dan Air	1,2	3,1	3,4	0,2
5. Konstruksi	23,2	25,5	21,8	31,9
6. Perdagangan	63,7	75,2	72,0	78,1
7. Transportasi, Pergudangan dan Komunikasi	31,9	32,5	33,1	28,7
8. Keuangan	6,1	8,1	4,7	5,1
9. Jasa Kemasyarakatan	84,7	95,7	104,5	100,1
Jumlah	482,5	512,5	503,5	530,3

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama (ribu Orang)

Status Pekerjaan Utama	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Berusaha sendiri	96,7	103,6	107,3	100,8
Berusaha dibantu buruh tidak tetap	98,2	113,5	97,4	111,9
Berusaha dibantu buruh tetap	16,3	14,5	19,9	24,2
Buruh/karyawan	135,2	150,9	161,2	156,1
Pekerja bebas di pertanian	14,1	7,8	16,1	9,3
Pekerja bebas di non pertanian	15,9	12,1	12,6	11,9
Pekerja keluarga/tak dibayar	106,1	110,1	88,9	116,0
Jumlah	482,5	512,5	503,5	530,3

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja Perminggu (ribu Orang)

Jumlah Jam Kerja Perminggu	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
0 / Sementara Tidak Bekerja	8,6	14,0	15,1	25,5
1 – 7	8,8	10,8	7,5	7,9
8 – 14	27,3	38,3	28,4	28,5
15 – 24	74,4	64,2	42,9	45,9
25 - 34	86,8	66,2	66,9	88,3
0 - 34	205,9	193,5	160,8	196,1
35 +	276,6	319,0	342,8	334,2
Jumlah	482,5	512,5	503,5	530,3

Penduduk Usia Kerja yang Bekerja Menurut Tingkat Pendidikan (ribu Orang)

Tingkat Pendidikan	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD ke bawah	197,1	192,2	188,1	235,8
Sekolah Menengah Pertama	87,8	88,4	91,2	93,9
Sekolah Menengah Atas	117,7	129,1	131,9	107,2
Sekolah Menengah Kejuruan	20,8	30,1	23,5	25,9
Diploma I/II/III	14,6	16,1	17,6	10,1
Universitas	44,5	56,6	51,2	57,4
Jumlah	482,5	512,5	503,5	530,3

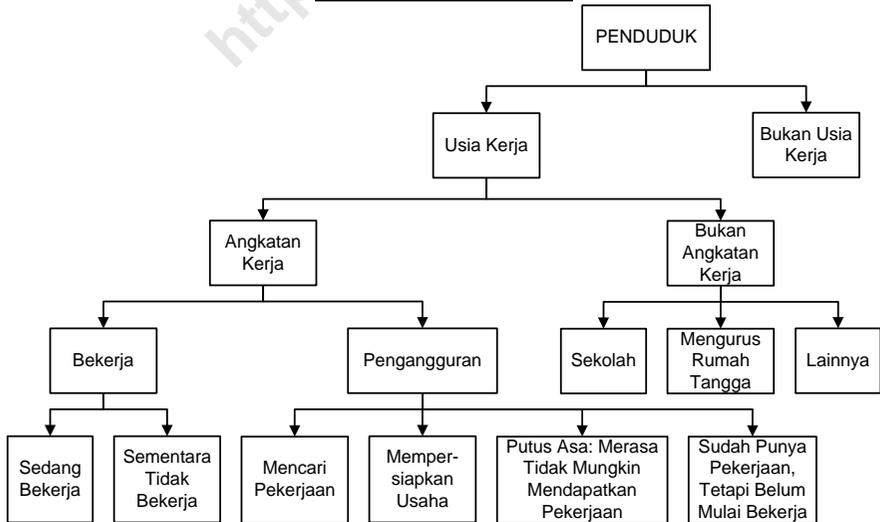
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan (Persen)

Tingkat Pendidikan	Agustus 2015	Februari 2016	Agustus 2016	Februari 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
SD ke bawah	2,04	1,36	1,79	1,41
Sekolah Menengah Pertama	3,96	0,06	0,46	4,78
Sekolah Menengah Atas	11,00	4,97	5,75	8,41
Sekolah Menengah Kejuruan	11,32	5,55	4,85	9,31
Diploma I/II/III	8,25	13,72	7,17	21,58
Universitas	9,75	7,26	11,44	5,72
Jumlah	6,05	3,43	4,01	4,82

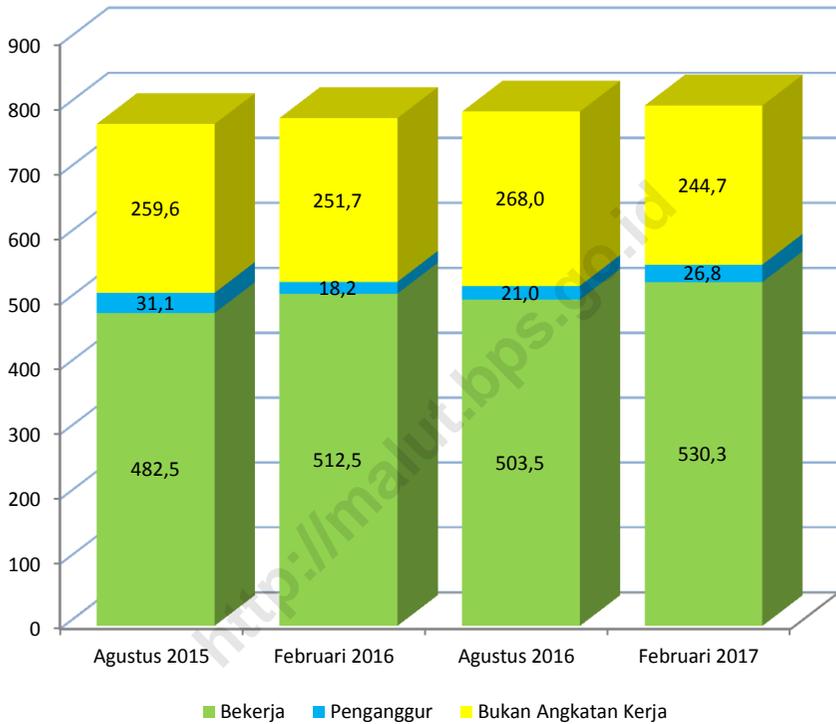
- Terkait ketenagakerjaan, penduduk dikelompokkan menjadi:
 - Penduduk Usia Kerja (PUK), yaitu penduduk yang berusia 15 tahun ke atas.
 - Penduduk Bukan Usia Kerja, yaitu penduduk yang berusia 0-14 tahun.
- Penduduk Usia Kerja terdiri atas Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja.
- Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang bekerja atau punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja, dan pengangguran.
- Bukan Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja yang sedang bersekolah, mengurus rumah tangga atau melakukan kegiatan lainnya.

- Bekerja adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh seseorang dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh pendapatan atau keuntungan, paling sedikit selama 1 (satu) jam (tidak terputus) dalam seminggu yang lalu. Kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tak dibayar yang membantu dalam suatu usaha atau kegiatan ekonomi.
- Pengangguran adalah penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan, atau sedang mempersiapkan suatu usaha baru atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan (*discouraged workers*), atau penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja/mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja (*future starts*).
- Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah besarnya penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase jumlah angkatan kerja (bekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja.
- Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. Tingkat pengangguran terbuka diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja.
- Lapangan usaha/pekerjaan adalah bidang kegiatan dari pekerjaan/usaha/perusahaan/kantor tempat seseorang bekerja. Klasifikasi lapangan usaha menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2005 yang mengacu pada *the International Standard of Industrial Classification (ISIC)*.
- Status pekerjaan adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan.

Diagram Ketenagakerjaan



**Penduduk Usia Kerja Menurut Jenis Kegiatan Utama
(ribu orang)**



KEMISKINAN

Jumlah, Komposisi dan Persentase Penduduk Miskin Provinsi Maluku Utara

Periode	Jumlah Penduduk Miskin (000)			Persentase Penduduk Miskin (%)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2011	8,10	89,33	97,43	2,80	11,58	9,18
Sep 2011	8,57	98,74	107,31	2,95	12,61	10,00
Mar 2012	7,57	84,35	91,91	2,55	10,69	8,47
Sep 2012	8,75	79,62	88,36	2,92	9,98	8,05
Mar 2013	9,16	74,04	83,20	2,99	9,22	7,50
Sep 2013	11,02	74,56	85,58	3,56	9,19	7,64
Mar 2014	12,19	70,45	82,64	3,95	8,56	7,30
Sep 2014	11,17	73,62	84,79	3,58	8,85	7,41
Mar 2015	12,25	67,65	79,90	3,85	7,95	6,84
Sep 2015	8,29	64,35	72,65	2,61	7,57	6,22
Mar 2016	10,58	64,10	74,68	3,32	7,44	6,33
Sep 2016	12,45	63,95	76,40	3,76	7,43	6,41
Mar 2017	12,00	64,47	76,47	3,61	7,40	6,35

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

Perkembangan Garis Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Periode	Garis Kemiskinan (rupiah/kapita/bulan)			Pertumbuhan GK (%)
	K	D	K+D	
	(2)	(3)	(4)	
Mar 2011	251 429	215 409	225 242	5,76
Sep 2011	264 367	226 299	236 590	5,04
Mar 2012	268 729	232 109	242 112	2,33
Sep 2012	276 117	240 447	250 184	3,33
Mar 2013	284 374	248 026	258 060	3,15
Sep 2013	317 176	281 482	291 352	12,90
Mar 2014	321 231	286 242	295 787	1,52
Sep 2014	339 561	307 374	316 160	6,89
Mar 2015	360 933	337 789	344 088	1,52
Sep 2015	378 538	356 325	362 370	6,89
Mar 2016	390 788	371 289	376 554	3,91
Sep 2016	405 368	379 454	386 489	2,64
Mar 2017	410 412	383 784	390 998	1,17

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

Indeks Kedalaman dan Kearifan Kemiskinan Provinsi Maluku Utara

Periode	Indeks Kedalaman Kemiskinan (P ₁)			Indeks Kearifan Kemiskinan (P ₂)		
	K	D	K+D	K	D	K+D
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Mar 2011	0,149	1,497	1,129	0,010	0,280	0,206
Sep 2011	0,473	2,754	2,137	0,109	0,884	0,674
Mar 2012	0,279	1,824	1,402	0,090	0,459	0,359
Sep 2012	0,078	1,135	0,846	0,003	0,196	0,143
Mar 2013	0,314	0,951	0,775	0,046	0,178	0,141
Sep 2013	0,270	1,127	0,890	0,036	0,210	0,162
Mar 2014	0,439	1,351	1,102	0,073	0,327	0,257
Sep 2014	0,398	1,444	1,159	0,074	0,309	0,245
Mar 2015	0,290	0,858	0,703	0,036	0,160	0,126
Sep 2015	0,611	1,348	1,148	0,143	0,320	0,272
Mar 2016	0,367	0,861	0,728	0,064	0,218	0,177
Sep 2016	0,249	1,176	0,918	0,023	0,275	0,205
Mar 2017	0,667	0,861	0,808	0,246	0,183	0,200

Keterangan: K = Perkotaan, D = Perdesaan

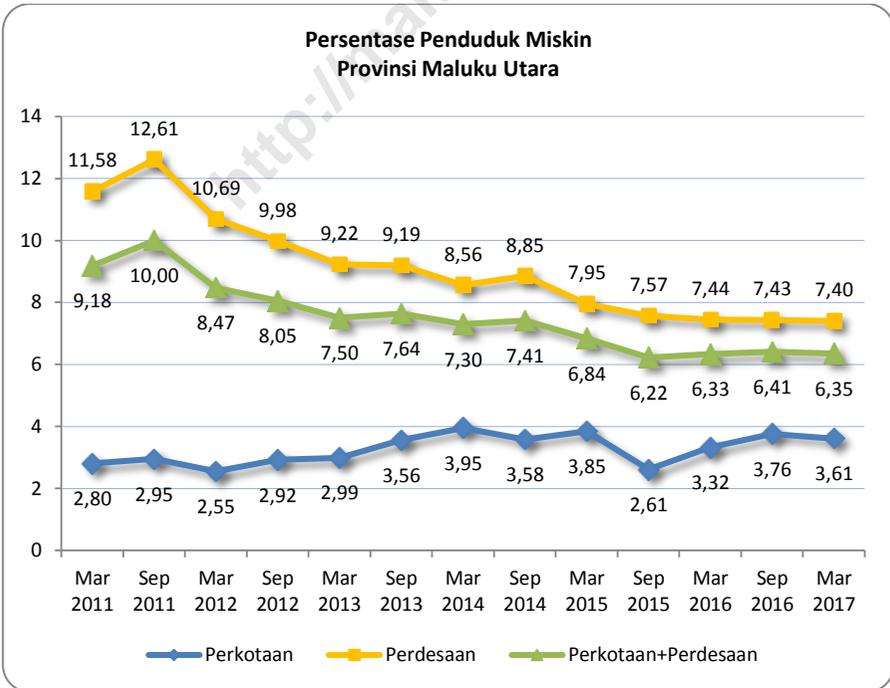
- Kemiskinan diukur menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran.
- Sumber data yang digunakan adalah data Modul Konsumsi Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan setiap triwulan.
- Metode yang digunakan dalam pengukuran kemiskinan di Indonesia adalah dengan menghitung Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari dua komponen yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), sebagai berikut:

$$GK = GKM + GKNM$$

- Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah garis kemiskinan.
- Penghitungan garis kemiskinan dilakukan secara terpisah untuk masing-masing provinsi daerah perkotaan dan perdesaan.
- Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2100 kilokalori per kapita per hari. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili oleh 52 jenis komoditi (padi-padian, umbi-umbian, ikan, daging, telur dan susu, sayuran, kacang-kacangan, buah-buahan, minyak dan lemak, dll).
- Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan. Paket komoditi kebutuhan dasar makanan diwakili

oleh 51 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perkotaan dan 47 jenis komoditi (kelompok pengeluaran) di perdesaan.

- *Head Count Index* mengukur persentase penduduk miskin terhadap total penduduk.
- Indeks Kedalaman Kemiskinan/*Poverty Gap Index* (P_1) merupakan ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap GK. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari GK.
- Indeks Keparahan Kemiskinan/*Poverty Severity Index* (P_2), memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.
- Garis kemiskinan didefinisikan sebagai nilai rupiah yang harus dikeluarkan seseorang dalam sebulan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar asupan kalori sebesar 2.100 kkal/hari per kapita (garis kemiskinan makanan) ditambah kebutuhan minimum non makanan yang merupakan kebutuhan dasar seseorang, yaitu papan, sandang, sekolah, dan transportasi serta kebutuhan individu dan rumah tangga dasar lainnya (garis kemiskinan non makanan).
- Penghitungan penduduk miskin sampai dengan tahun 2010 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi Survei Penduduk Antar Sensus (Supas) tahun 2005.
- Penghitungan penduduk miskin tahun 2011 s.d. 2013 menggunakan jumlah penduduk hasil proyeksi berdasarkan Sensus Penduduk tahun 2010 (SP2010).



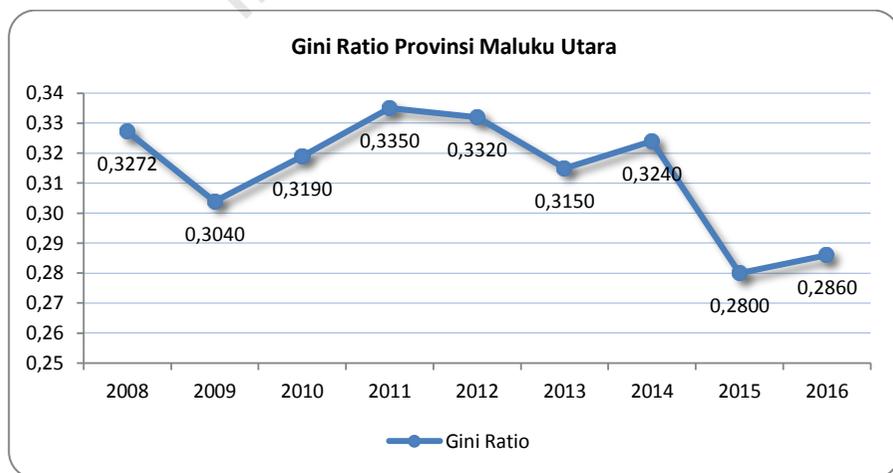
GINI RATIO

Perkembangan Gini Ratio Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	2009	2010	2011*)	2012*)	2013*)	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(7)
Halmahera Barat	0,278	0,311	0,255	0,252	0,223	0,249	0,234	0,258
Halmahera Tengah	0,270	0,261	0,286	0,282	0,257	0,339	0,322	0,265
Kepulauan Sula	0,270	0,326	0,316	0,317	0,267	0,295	0,298	0,262
Halmahera Selatan	0,265	0,285	0,248	0,266	0,274	0,303	0,244	0,209
Halmahera Utara	0,281	0,295	0,283	0,338	0,253	0,312	0,291	0,257
Halmahera Timur	0,226	0,308	0,297	0,261	0,248	0,271	0,264	0,266
Pulau Morotai	-	0,308	0,262	0,287	0,315	0,288	0,269	0,241
Pulau Taliabu	-	-	-	-	-	-	0,233	0,273
Ternate	0,217	0,233	0,276	0,289	0,254	0,293	0,245	0,270
Tidore Kepulauan	0,200	0,227	0,251	0,239	0,257	0,222	0,205	0,227
Maluku Utara	0,304	0,319	0,335	0,332	0,315	0,324	0,280	0,286

*) Hasil Backcasting 2011-2013

- Gini ratio (koefisien gini) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh.
- Nilai Gini ratio ada di antara 0 dan 1. Semakin tinggi nilai Gini ratio, menunjukkan ketidakmerataan pendapatan yang semakin tinggi. Jika nilai Gini ratio adalah 0 (nol), maka artinya terdapat pemerataan sempurna pada distribusi pendapatan, sedangkan jika bernilai 1 (satu), berarti terjadi ketidakmerataan pendapatan yang sempurna.
- Penghitungan Gini ratio menggunakan pendekatan data pengeluaran hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas).



INDUSTRI MANUFAKTUR

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen)

Tahun	Triwulan I 2017		Triwulan II 2017		Triwulan III 2017		Triwulan IV 2017	
	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2012	2,03	-	2,79	-	3,22	-	4,63	-
2013	2,16	13,40	2,54	13,13	2,04	11,83	1,33	8,31
2014	0,93	7,01	2,42	6,88	8,67	13,83	1,37	13,87
2015	4,88	15,53	5,42	21,79	-1,03	10,92	-2,17	7,05
2016	-0,69	1,37	-0,94	-0,80	-2,04	-2,71	0,68	-2,96
2017	-1,73	-3,98	2,73	-0,43				

Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil

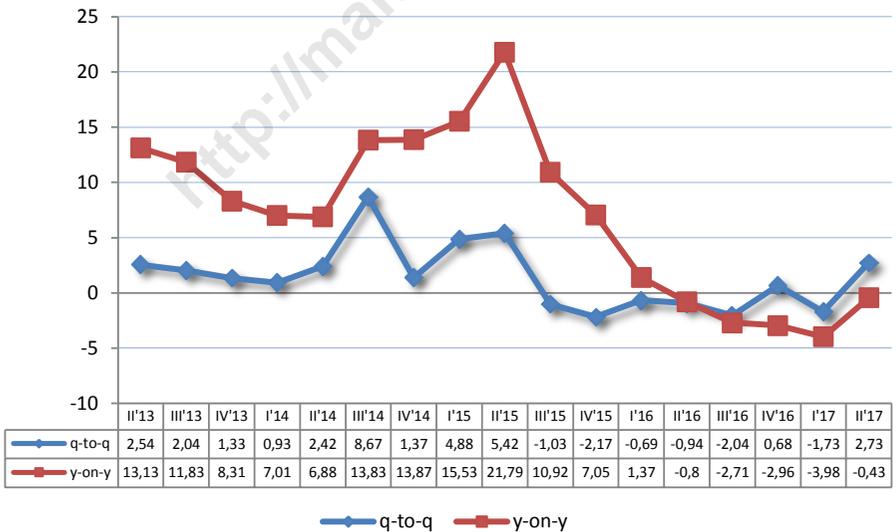
Kode KBLI	Jenis Industri	Triwulan I 2017		Triwulan II 2017	
		q-to-q	y-on-y	q-to-q	y-on-y
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
10	Industri Makanan	-1,19	6,89	14,68	11,64
11	Industri Minuman	-3,15	4,58	-5,39	-0,14
14	Industri Pakaian Jadi	13,76	41,42	7,31	40,88
16	Industri Kayu, Barang dari Kayu, Barang dari Kayu dan Gabus (Tidak Termasuk Furnitur) dan Barang Anyaman dari Bambu, Rotan dan Sejenisnya	-4,05	24,11	3,76	29,89
23	Industri Barang Galian Bukan Logam	-3,33	7,64	-11,41	-13,16
25	Industri Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya	1,64	43,03	-23,59	-10,35
30	Industri Alat Angkutan Lainnya	-2,33	48,07	9,76	36,16
31	Industri Furnitur	7,45	-1,52	17,09	18,42
	IMK (Industri Mikro dan Kecil)	-0,33	18,42	5,20	13,68

- Industri Pengolahan adalah suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan mengubah suatu barang dasar secara mekanis, kimia, atau dengan tangan sehingga menjadi barang jadi/setengah jadi, dan atau barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya, dan sifatnya lebih dekat kepada pemakai akhir. Termasuk dalam kegiatan ini adalah jasa industri/makloon dan pekerjaan perakitan (*assembling*).
- Perusahaan atau usaha industri adalah suatu unit (kesatuan) usaha yang melakukan kegiatan ekonomi, bertujuan menghasilkan barang atau jasa, terletak pada suatu bangunan atau lokasi tertentu, dan mempunyai catatan administrasi

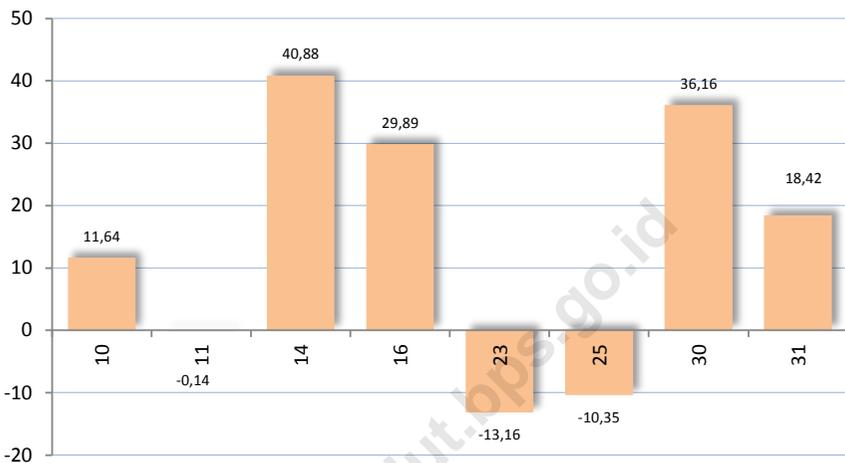
tersendiri mengenai produksi dan struktur biaya serta ada seorang atau lebih yang bertanggung jawab atas usaha tersebut.

- Perusahaan Industri Pengolahan dibagi dalam 4 golongan yaitu: Industri Besar (banyaknya tenaga kerja 100 orang atau lebih); Industri Sedang (banyaknya tenaga kerja 20-99 orang); Industri Kecil (banyaknya tenaga kerja 5-19 orang); Industri Rumah Tangga (banyaknya tenaga kerja 1-4 orang).
- Jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.
- Klasifikasi industri yang digunakan dalam survei industri pengolahan adalah klasifikasi yang berdasar kepada International Standard Industrial Classification of all Economic Activities (ISIC) revisi 4 , yang telah disesuaikan dengan kondisi di Indonesia dengan nama Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2009.

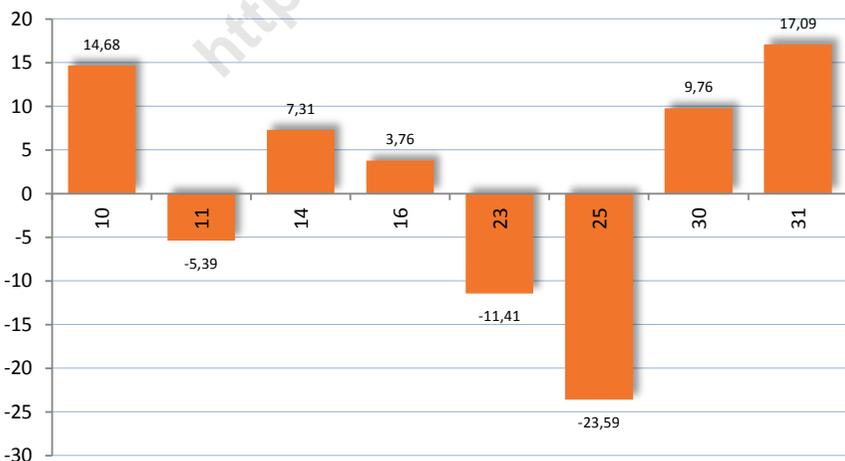
Perkembangan Produksi Industri Manufaktur Besar dan Sedang (persen)



**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
Triwulanan (y-on-y), Triwulan II Tahun 2017, Menurut Jenis KBLI**



**Pertumbuhan Produksi Industri Manufaktur Mikro dan Kecil
Triwulanan (q-to-q), Triwulan II Tahun 2017, Menurut Jenis KBLI**



INDEKS HARGA KONSUMEN DAN INFLASI

Perkembangan Indeks Harga Konsumen (IHK) dan Inflasi (%)

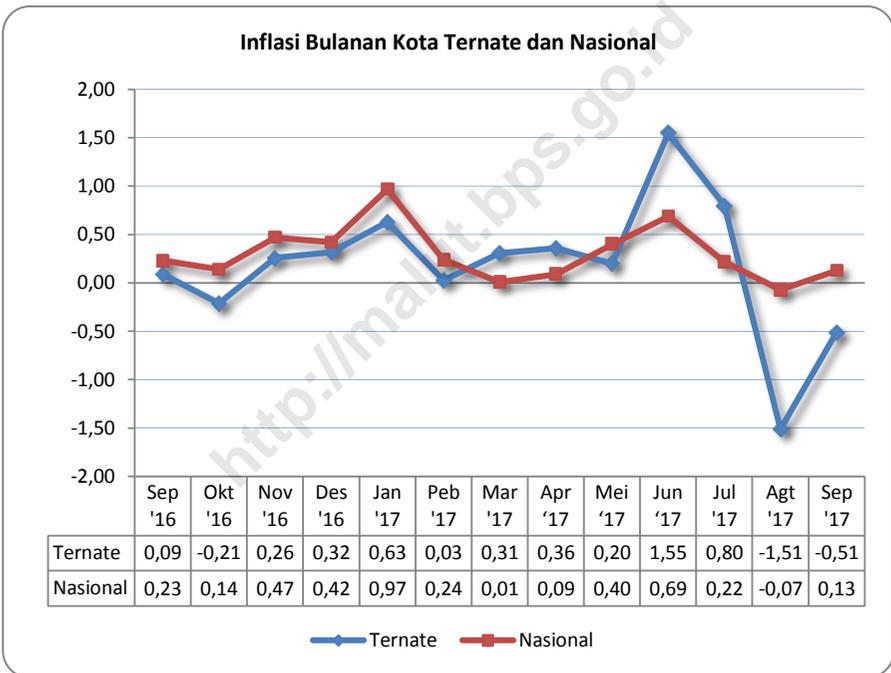
Kota Ternate dan Nasional

Bulan	Ternate				Nasional			
	IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Tahun Kalender	Year on Year	IHK	Inflasi Bulanan	Inflasi Tahun Kalender	Year on Year
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Jun '16	128,46	0,30	0,49	3,87	124,29	0,66	1,06	3,45
Jul '16	129,79	1,04	1,53	4,02	125,15	0,69	1,76	3,21
Ags '16	129,66	-0,1	1,43	2,31	125,13	-0,02	1,74	2,79
Sep '16	129,78	0,09	1,53	4,05	125,41	0,23	1,97	3,08
Okt '16	129,51	-0,21	1,31	2,89	125,59	0,14	2,11	3,31
Nov '16	129,85	0,26	1,58	3,14	126,18	0,47	2,59	3,58
Des '16	130,27	0,32	1,91	1,91	126,71	0,42	3,02	3,02
Jan '17	131,09	0,63	0,63	2,02	127,94	0,97	0,97	4,53
Peb '17	131,13	0,03	0,66	3,02	128,24	0,24	1,21	3,83
Mar '17	130,72	0,31	0,35	2,41	128,22	0,01	1,19	3,82
Apr '17	131,19	0,36	0,71	2,72	128,33	0,09	1,28	4,17
Mei '17	131,45	0,20	0,91	2,63	128,83	0,40	1,68	4,33
Jun '17	133,49	1,55	2,47	3,92	129,72	0,69	2,38	4,37
Jul '17	134,56	0,80	3,29	3,68	130,00	0,22	2,60	3,88
Ags '17	132,53	-1,51	1,73	2,21	129,91	-0,07	2,53	3,83
Sep '17	131,86	-0,51	1,22	1,60	130,08	0,13	2,66	3,72

- Indeks Harga Konsumen (IHK) adalah suatu indeks yang menghitung rata-rata perubahan harga dalam suatu periode, dari suatu kumpulan barang dan jasa yang dikonsumsi oleh penduduk/rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.
- Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dimana barang dan jasa tersebut merupakan kebutuhan pokok masyarakat atau turunnya daya jual mata uang suatu negara.
- Inflasi Tahun Kalender adalah perubahan kenaikan tingkat harga secara umum dari barang/jasa, atau merosotnya daya beli atau nilai riil uang selama satu tahun kalender (dari bulan Januari tahun ini sampai dengan bulan ini tahun ini). Ini dihitung dari persentase perubahan IHK bulan ini tahun ini terhadap IHK bulan Desember tahun lalu.
- *Year on year* adalah inflasi selama setahun dengan membandingkan IHK bulan tertentu pada tahun ke-n dengan IHK bulan yang sama pada tahun ke-(n-1).
- Cara menghitung inflasi bulan ke-n yaitu:

$$\left[\left(\frac{\text{IHK}(n)}{\text{IHK}(n-1)} \right) - 1 \right] \times 100\%$$

- Mulai Januari 2014, pengukuran inflasi di Indonesia menggunakan IHK tahun dasar 2012 = 100, dimana terdapat beberapa perubahan yang mendasar dalam penghitungan IHK baru (2012 = 100) dibandingkan IHK lama (2007 = 100), khususnya mengenai cakupan kota, paket komoditas, dan diagram timbang.
- Perubahan tersebut didasarkan pada Survei Biaya Hidup (SBH) 2012 yang dilaksanakan oleh BPS, yang merupakan salah satu bahan dasar utama dalam penghitungan IHK.
- Hasil SBH 2012 sekaligus mencerminkan adanya perubahan pola konsumsi masyarakat dibandingkan dengan hasil SBH sebelumnya.



EKSPOR DAN IMPOR

Perkembangan Berat Bersih dan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara

Bulan	Berat Bersih(kg)	Nilai(US \$)
(1)	(2)	(3)
Ags '16	7 556 860	6 429 376
Sep '16	-	-
Okt '16	7 500 000	6 703 425
Nov '16	-	-
Des '16	8 023 920	8 001 854
Jan '17	9 713 340	12 256 157
Peb '17	-	-
Mar '17	18 153 780	19 238 727
Apr '17	71 928 024	21 413 643
Mei '17	188 053 190	19 205 862
Jun '17	71 148 140	12 746 868
Jul '17	182 621 220	22 532 792
Ags '17	292 553 400	21 655 468

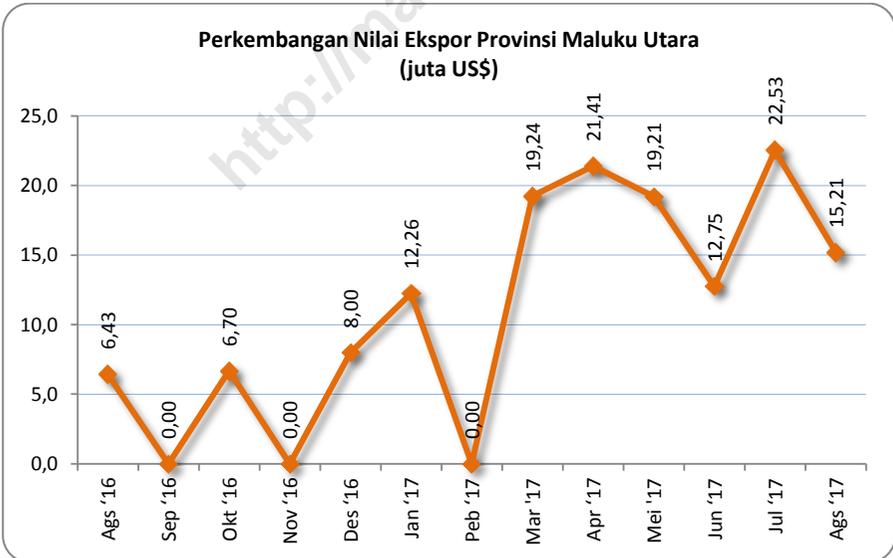
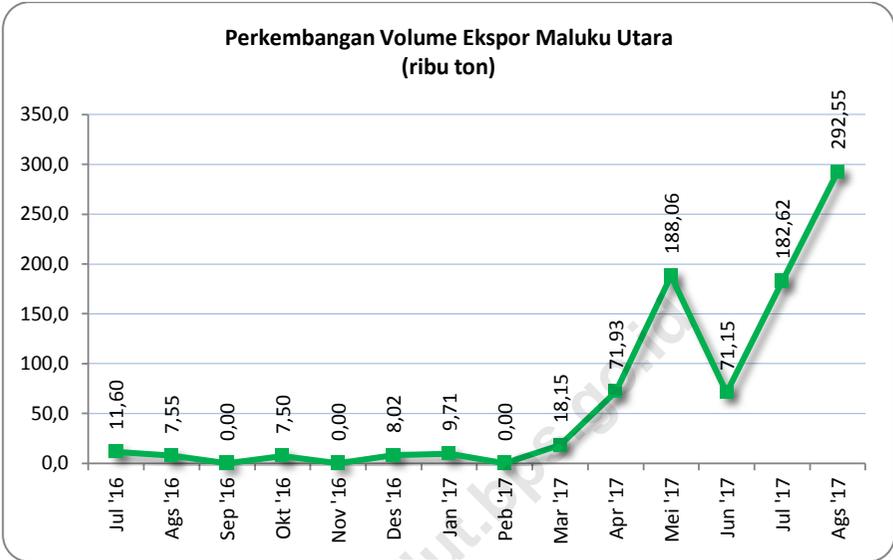
Perkembangan Nilai Ekspor Provinsi Maluku Utara Menurut Jenis Komoditi (US \$)

Bulan	Ferro-nickel	Other tube, pipes & hollow profile, seamless, unfinished drill pipe (green pipe)	Nickel ores & concentrates	Alloy pig iron; spiegeleisen	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ags '16	-	-	-	6 429 376	6 429 376
Sep '16	-	-	-	-	-
Okt '16	-	-	-	6 703 425	6 703 425
Nov '16	-	-	-	-	-
Des '16	8 001 854	-	-	-	8 001 854
Jan '17	12 247 059	9 098	-	-	12 256 157
Peb '17	-	-	-	-	-
Mar '17	19 238 727	-	-	-	19 238 727
Apr '17	19 849 843	-	1 563 800	-	21 413 643
Mei '17	14 066 842	-	5 139 020	-	19 205 862
Jun '17	11 354 218	-	1 392 650	-	12 746 868
Jul '17	17 822 016	-	4 710 776	-	22 532 792
Ags '17	13 370 018	-	8 285 450	-	21 655 468

Perkembangan Berat Bersih dan Nilai Impor Provinsi Maluku Utara

Bulan	Berat Bersih(kg)	Nilai(US \$)
(1)	(2)	(3)
Ags '16	45 443 747	5 354 160
Sep '16	75 824 920	59 588 053
Okt '16	31 291 127	10 087 951
Nov '16	1 831 583	3 322 055
Des '16	24.505.424	21.536.896
Jan '17	14 132 841	7 636 919
Peb '17	2 112 566	1 747 199
Mar '17	2 183 194	2 228 921
Apr '17	56 500 210	5 607 893
Mei '17	14 567 364	9 207 744
Jun '17	38 700 375	10 031 402
Jul '17	38 700 375	1 577 311
Ags '17	1 584 509	35 748 831

- Ekspor meliputi seluruh barang yang keluar dari wilayah Republik Indonesia, baik bersifat komersial maupun bukan komersial seperti bantuan kredit lunak, hadiah dan sebagainya.
- Ekspor kapal laut dan pesawat udara termasuk dalam statistik ekspor sedangkan ekspor bunker oil untuk kapal tidak tercatat.
- Data ekspor dikumpulkan berdasarkan dokumen ekspor/pemberitahuan ekspor barang (PEB) yang diisi oleh eksportir dan telah diberikan ijin muat oleh Kantor Pelayanan Bea dan Cukai, dan selanjutnya dikirim ke BPS.
- Impor meliputi seluruh barang-barang yang masuk ke wilayah kepabeanaan Indonesia.
- Data impor dikumpulkan berdasarkan dokumen impor/Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang diisi oleh importir.



NILAI TUKAR PETANI

Perkembangan Nilai Tukar Petani Provinsi Maluku Utara

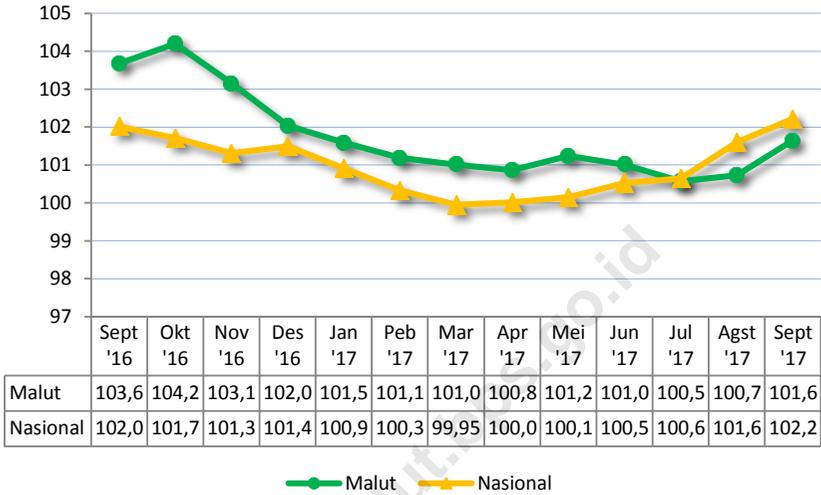
Bulan	NTP Per Sub Sektor					NTP Malut	NTP Nasional
	Tanaman Pangan	Horti-kultura	Tanaman Perkebunan Rakyat	Peternakan	Perikanan		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Sep 2016	110,48	106,25	96,31	111,38	102,15	103,68	102,02
Okt 2016	110,73	108,04	96,83	111,01	101,38	104,20	101,71
Nov 2016	111,00	107,49	94,77	109,56	101,37	103,15	101,31
Des 2016	109,84	107,23	92,56	109,21	102,66	102,04	101,49
Jan 2017	108,27	107,64	92,37	107,86	103,55	101,59	100,91
Peb 2017	106,69	107,48	92,51	106,89	104,11	101,19	100,33
Mar 2017	106,83	106,85	92,46	106,47	104,04	101,01	99,95
Apr 2017	106,61	106,76	92,19	107,15	103,27	100,87	100,01
Mei 2017	106,01	106,91	93,37	106,69	104,11	101,24	100,15
Juni 2017	103,75	107,81	93,45	106,68	104,76	101,01	100,53
Jul 2017	101,86	107,79	93,80	105,80	103,98	100,57	100,65
Agst 2017	101,48	107,79	94,07	107,57	102,47	100,73	101,60
Sep 2017	100,40	109,47	95,96	107,81	103,03	101,65	102,22

Perkembangan Inflasi Perdesaan Maluku Utara dan Nasional

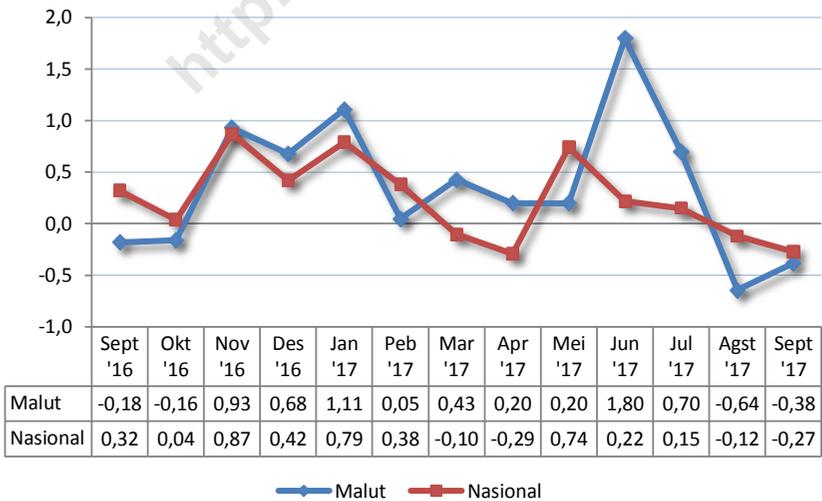
Bulan	Inflasi Perdesaan Maluku Utara	Inflasi Perdesaan Nasional
(1)	(2)	(3)
Sep 2016	-0.18	0.32
Okt 2016	-0.16	0.04
Nov 2016	0.93	0.87
Des 2016	0.68	0.42
Jan 2017	1,11	0,79
Peb 2017	0,05	0,38
Mar 2017	0,43	-0,10
Apr 2017	0,20	-0,29
Mei 2017	0,20	0,74
Juni 2017	1,80	0,22
Jul 2017	0,70	0,15
Agst 2017	-0,64	-0,12
Sep 2017	-0,38	-0,27

- Nilai Tukar Petani (NTP) adalah angka perbandingan indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani yang dinyatakan dalam persentase.
- Mulai Desember 2013 dilakukan perubahan tahun dasar dalam penghitungan NTP dari tahun dasar 2007=100 menjadi tahun dasar 2012=100. Perubahan tahun dasar ini dilakukan untuk menyesuaikan perubahan/pergeseran pola produksi pertanian dan pola konsumsi rumah tangga pertanian diperdesaan, serta perluasan cakupan subsektor pertanian dan provinsi dalam penghitungan NTP, agar penghitungan indeks dapat dijaga ketepatannya.
- NTP terdiri dari 5 (lima) sub-sektor, yaitu Tanaman Pangan, Hortikultura, Tanaman Perkebunan Rakyat (TPR), Peternakan dan Perikanan.
- Indeks harga yang diterima petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga produsen atas hasil produksi petani.
- Indeks harga yang dibayar petani adalah indeks harga yang menunjukkan perkembangan harga kebutuhan rumahtangga petani, baik kebutuhan konsumsi rumahtangga maupun kebutuhan untuk proses produksi pertanian.
- Nilai tukar petani (NTP) adalah suatu indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan atau kemampuan daya beli petani.
- Cara penghitungan NTP adalah rasio antara indeks harga yang diterima petani dengan indeks harga yang dibayar petani dikalikan seratus.
- Indeks Konsumsi Rumah tangga (IKRT) merupakan bagian dari indeks yang dibayar oleh petani untuk konsumsi kebutuhan rumah tangga.
- Indeks Konsumsi Rumah Tangga (IKRT) meliputi sub kelompok antara lain: bahan makanan, makanan jadi, perumahan, sandang, kesehatan, pendidikan rekreasi & olah raga serta transportasi dan komunikasi.
- Perubahan nilai Indeks Konsumsi Rumah Tangga lebih dikenal sebagai Inflasi Perdesaan.

Perkembangan Nilai Tukar Petani



Perkembangan Inflasi Perdesaan



PARIWISATA

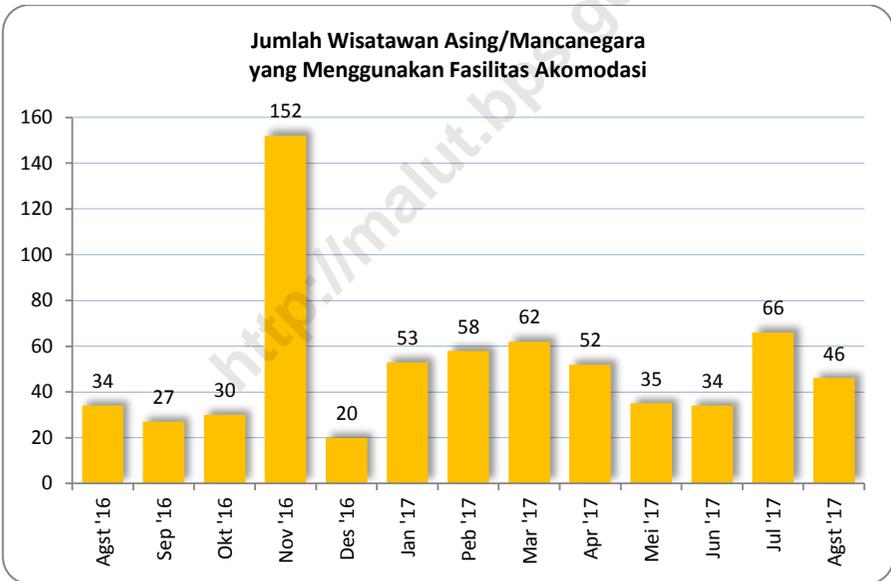
Jumlah Wisatawan yang Menggunakan Fasilitas Akomodasi Provinsi Maluku Utara

Bulan	Wisatawan Asing/Mancanegara	Wisatawan Nusantara	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
Agst '16	34	12 518	12 552
Sep '16	27	12 527	12 554
Okt '16	30	12 708	12 738
Nov '16	152	13 524	13 676
Des '16	20	15 576	15 596
Jan '17	53	12 275	12 328
Peb '17	58	13 277	13 335
Mar '17	62	15 983	16 045
Apr '17	52	15 865	15 917
Mei '17	35	15 372	15 407
Jun '17	34	13 691	13 725
Jul '17	66	17 628	17 694
Agst '17	46	17 371	17 417

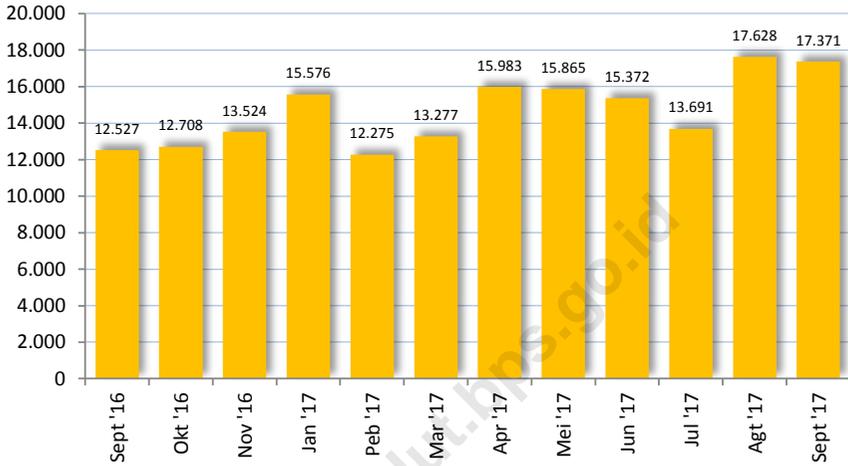
Tingkat Penghunian Kamar Provinsi Maluku Utara

Bulan	Malam Kamar Tersedia	Malam Kamar Terjual	TPK
(1)	(2)	(3)	(4)
Agst '16	52 328	26 180	50,03
Sep '16	50 010	19 107	38,20
Okt '16	52 793	19 784	37,47
Nov '16	50 790	20 090	39,55
Des '16	51 739	19 023	36,76
Jan '17	57 784	17 555	30,38
Peb '17	56 702	18 193	32,09
Mar '17	60 574	20 345	33,59
Apr '17	60 240	19 581	32,50
Mei '17	62 775	20 177	32,14
Jun '17	60 780	17 649	29,04
Jul '17	63 395	19 178	30,25
Agst '17			31,60

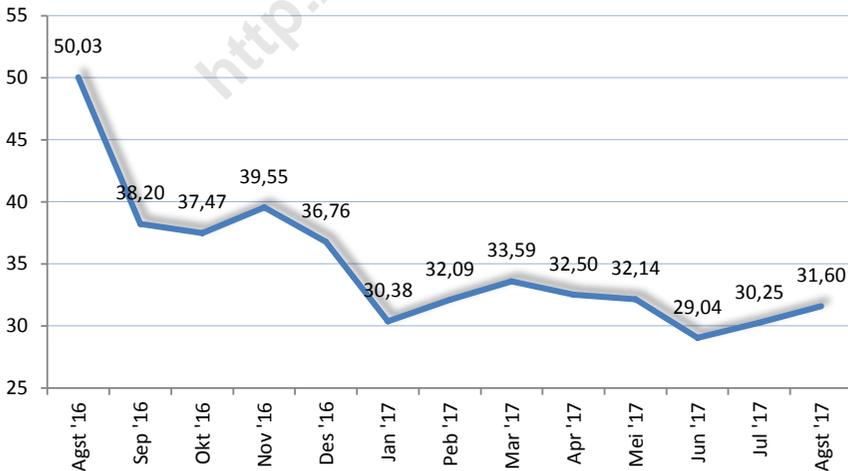
- Tingkat Penghunian Kamar (TPK) Hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam kamar yang tersedia dikali 100 persen.
- Tingkat Pemakaian Tempat Tidur adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya malam tempat tidur yang tersedia dikali 100 persen.
- Rata-rata Lamanya Tamu Menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dengan banyaknya tamu yang datang menginap di akomodasi.
- Rata-rata Tamu Per Kamar (GPR) adalah perbandingan antara banyaknya malam tamu atau malam tempat tidur dengan banyaknya malam kamar yang dihuni.
- Keterangan:
 - 1 malam kamar = 1 kamar x 1 malam
 - 1 malam tempat tidur = 1 tempat tidur x 1 malam
 - 1 malam tamu = 1 tamu x 1 malam



Jumlah Wisatawan Nusantara yang Menggunakan Fasilitas Akomodasi



Tingkat Penghunian Kamar



PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

Kategori	Uraian	Triwulan			
		III 2016	IV 2016	I 2017	II 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 875,2	1 845,6	1 882,2	1 922,1
B	Pertambangan dan Penggalian	643,6	662,0	693,4	714,8
C	Industri Pengolahan	415,1	401,3	431,5	471,8
D	Pengadaan Listrik dan Gas	6,7	6,8	7,5	8,3
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	5,9	6,0	6,2	6,4
F	Konstruksi	479,1	508,8	504,8	514,6
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 327,5	1 320,5	1 352,1	1 403,0
H	Transportasi dan Pergudangan	469,3	476,8	481,7	501,2
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	33,4	34,5	36,3	36,4
J	Informasi dan Komunikasi	276,6	280,2	282,6	291,4
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	230,0	245,9	237,6	247,9
L	Real Estate	8,4	8,6	8,9	9,2
M,N	Jasa Perusahaan	23,9	24,0	24,4	25,3
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	1 169,6	1 265,5	1 192,9	1 258,1
P	Jasa Pendidikan	279,4	285,1	280,7	285,4
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	155,5	160,6	157,5	162,4
R,S,T,U	Jasa lainnya	58,2	58,9	58,8	61,2
PDRB		7 457,5	7 591,2	7 639,0	7 919,5

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Lapangan Usaha (milyar rupiah)

Kate- gori	Uraian	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1 265,6	1 252,2	1 266,5	1 277,4
B	Pertambangan dan Penggalian	519,8	530,5	545,8	551,9
C	Industri Pengolahan	334,2	320,6	346,1	379,2
D	Pengadaan Listrik dan Gas	5,7	5,8	5,9	6,4
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	4,9	5,0	5,1	5,3
F	Konstruksi	357,3	378,0	371,8	376,5
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1 003,6	997,1	1 012,0	1 040,9
H	Transportasi dan Pergudangan	321,3	322,7	325,6	334,6
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	24,9	25,5	26,6	26,5
J	Informasi dan Komunikasi	245,9	246,8	248,4	254,0
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	166,8	175,8	167,8	174,3
L	Real Estate	6,5	6,6	6,8	7,0
M,N	Jasa Perusahaan	18,8	18,8	18,9	19,5
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	846,8	914,6	864,2	897,4
P	Jasa Pendidikan	191,1	193,3	190,2	192,6
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	119,2	120,7	118,5	121,7
R,S,T,U	Jasa lainnya	46,2	46,5	46,3	47,8
PDRB		5 478,5	5 560,5	5 566,5	5 712,9

Laju Pertumbuhan PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Menurut Lapangan Usaha (Persentase)

Kategori	Uraian	Triw II-2017	Triw II-2017	Sumber
		terhadap	terhadap	Pertumbuhan
(1)	(2)	Triw I-2017	Triw II-2016	Triw II-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,86	3,52	0,81
B	Pertambangan dan Penggalian	1,13	14,02	1,27
C	Industri Pengolahan	9,81	24,40	1,39
D	Pengadaan Listrik dan Gas	7,59	4,49	0,01
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,82	6,05	0,01
F	Konstruksi	1,26	6,59	0,44
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	2,86	7,17	1,30
H	Transportasi dan Pergudangan	2,76	8,45	0,49
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	-0,35	9,78	0,04
J	Informasi dan Komunikasi	2,39	7,87	0,35
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	2,31	3,96	0,12
L	Real Estate	2,17	8,53	0,01
M,N	Jasa Perusahaan	3,02	6,96	0,02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	3,84	2,16	0,36
P	Jasa Pendidikan	1,25	5,68	0,19
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	2,77	4,53	0,10
R,S,T,U	Jasa lainnya	3,20	5,97	0,05
	PDRB	2,61	6,96	6,96

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Pengeluaran (milyar rupiah)

Komponen	Triwulan	Triwulan	Triwulan	Triwulan
	III 2016	IV 2016	I 2017	II 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	4 343,7	4 370,3	4 449,2	4 574,5
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	88,2	89,0	91,4	93,7
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	2 320,2	2 936,5	2 424,4	2 589,1
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	2 064,1	2 108,7	2 128,1	2 199,0
5. Perubahan Inventori	-19,9	7,3	-10,1	39,9
6. Ekspor Luar Negeri	183,8	210,2	434,2	723,1
7. Impor Luar Negeri	967,3	482,5	170,9	347,7
8. Net Ekspor Antar Daerah	-555,4	-1 648,3	-1 705,0	-1 952,1
PDRB	7 457,5	7 591,2	7 641,3	7 919,5

PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Konstan Menurut Pengeluaran (milyar rupiah)

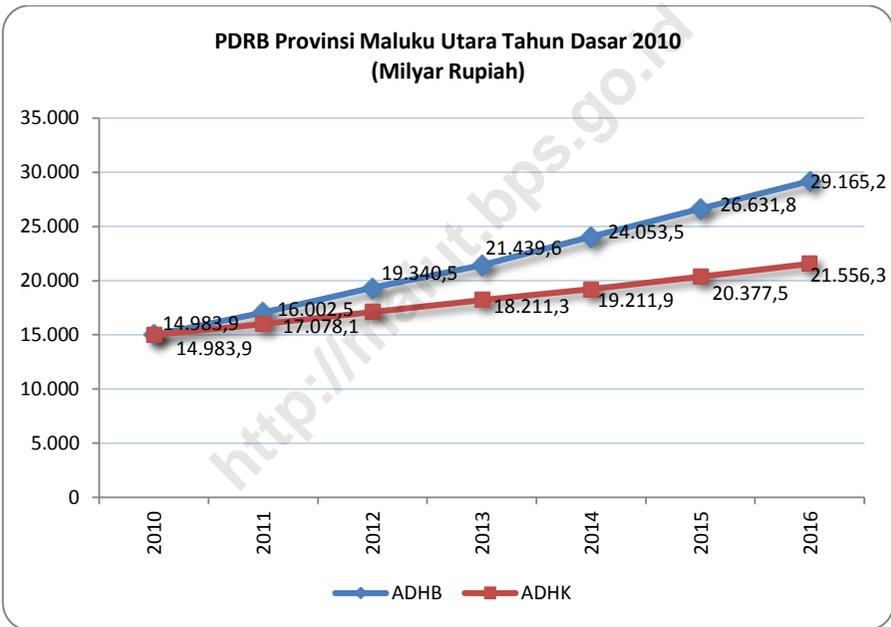
Komponen	Triwulan III 2016	Triwulan IV 2016	Triwulan I 2017	Triwulan II 2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga	3 193,8	3 196,9	3 221,4	3 292,2
2. Pengeluaran Konsumsi LNPRT	66,4	66,9	68,0	69,4
3. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah	1 602,7	2 007,5	1 661,0	1 749,5
4. Pembentukan Modal Tetap Bruto	1 578,1	1 596,2	1 593,9	1 618,5
5. Perubahan Inventori	-12,3	4,5	-6,2	24,1
6. Ekspor Luar Negeri	178,2	172,6	354,2	539,6
7. Impor Luar Negeri	699,7	384,6	133,6	269,8
8. Net Ekspor Antar Daerah	-428,8	-1 099,6	-1 190,9	-1 310,6
PDRB	5 478,5	5 560,5	5 567,9	5 712,9

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Kabupaten/Kota (Tahun Dasar 2010, rupiah)

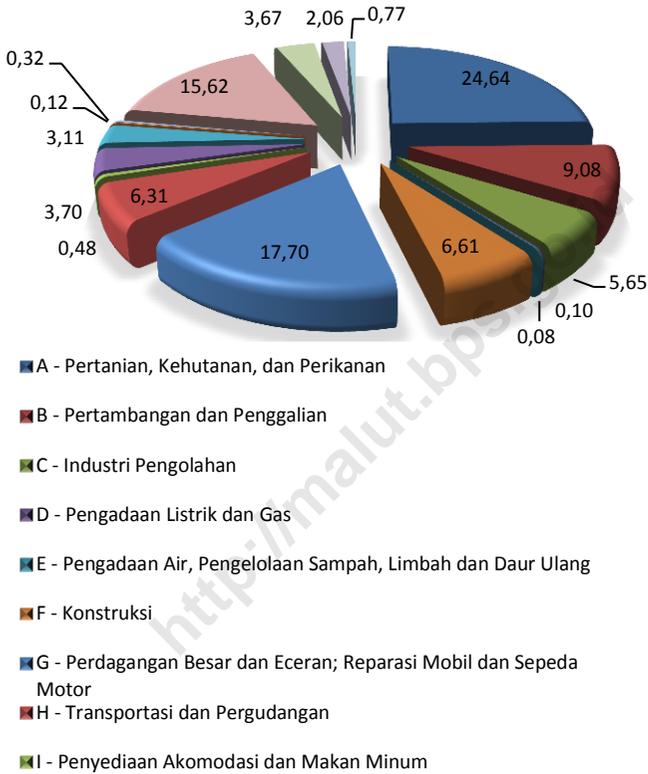
Kabupaten/Kota	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
Halmahera Barat	13 579 981	14 757 254	15 842 387
Halmahera Tengah	28 942 846	30 989 558	34 479 189
Kepulauan Sula	17 217 823	18 812 570	20 047 581
Halmahera Selatan	16 812 026	18 199 534	19 529 220
Halmahera Utara	21 108 052	22 893 711	24 246 416
Halmahera Timur	25 468 926	27 251 319	28 803 758
Pulau Morotai	16 362 733	17 794 041	19 257 462
Pulau Taliabu	17 561 548	19 122 379	20 775 118
Ternate	30 134 072	33 238 594	36 128 993
Tidore Kepulauan	19 495 788	21 664 660	23 272 636
Maluku Utara	21 114 230	22 919 861	24 593 079

- PDRB adalah jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha atau jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi dalam suatu wilayah tertentu.
- PDRB dihitung berdasarkan:
 1. Atas dasar harga berlaku (ADHB), Menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada setiap tahun.
 2. Atas dasar harga konstan (ADHK), Menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun dasar tertentu sebagai dasar.
- Pendekatan yang digunakan dalam penghitungan PDRB ada 3 macam, yaitu:

1. Pendekatan Produksi, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah nilai tambah barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah dalam jangka waktu tertentu.
2. Pendekatan Pendapatan, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah seluruh balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi (FP) yang digunakan dalam proses produksi di suatu wilayah dalam jangka waktu tertentu.
3. Pendekatan Pengeluaran, pendekatan ini menghitung PDRB berdasarkan jumlah dari seluruh pengeluaran yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi (unit institusi). Pengeluaran yang dimaksud diistilahkan sebagai permintaan akhir.



Struktur PDRB Maluku Utara Tahun Dasar 2010 Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Triwulan II Tahun 2017



INDEKS TENDENSI KONSUMEN

Indeks Tendensi Konsumen Menurut Variabel Pembentuknya

Variabel Pembentuk	Triwulan			
	III-2016	IV-2016	I-2017	II-2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pendapatan rumah tangga	107,15	105,14	93,67	123,85
Pengaruh inflasi terhadap total pengeluaran rumah tangga	90,47	98,44	108,51	102,71
Volume/frekuensi konsumsi barang/jasa	99,09	99,09	112,26	110,27
Indeks Tendensi Konsumen	100,87	103,05	101,71	115,17

- Indeks Tendensi Konsumen (ITK) adalah indikator perkembangan ekonomi terkini yang dihasilkan Badan Pusat Statistik melalui Survei Tendensi Konsumen (STK).
- ITK merupakan indeks yang menggambarkan kondisi ekonomi konsumen pada triwulan berjalan dan perkiraan pada triwulan mendatang.
- Responden STK merupakan sub-sampel dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) khusus di daerah perkotaan.
- Pemilihan sampel dilakukan secara panel antar triwulan untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai perubahan persepsi konsumen antar waktu.
- Nilai ITK Provinsi Maluku Utara pada Triwulan III-2017 diperkirakan sebesar 101,82, artinya kondisi ekonomi konsumen diperkirakan akan meningkat dari triwulan sebelumnya. Angka tersebut menggambarkan tingkat optimisme konsumen diperkirakan lebih tinggi dibandingkan Triwulan II-2017 (nilai ITK sebesar 115,17).

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

Indeks Pembangunan Manusia dan Peringkat Menurut Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	IPM					Peringkat				
	2012	2013	2014	2015	2016	2012	2013	2014	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Halmahera Barat	60,71	61,47	62,06	62,97	63,83	5	5	5	5	5
Halmahera Tengah	59,94	60,89	61,49	62,07	63,05	6	6	6	6	6
Kepulauan Sula	58,83	59,77	60,18	60,50	61,25	8	8	8	8	8
Halmahera Selatan	59,50	59,92	60,34	61,26	62,17	7	7	7	7	7
Halmahera Utara	62,94	63,81	64,18	65,04	66,02	3	3	3	3	3
Halmahera Timur	61,73	62,71	63,26	63,99	64,92	4	4	4	4	4
Pulau Morotai	57,16	57,97	58,34	59,27	59,87	9	9	9	9	9
Pulau Taliabu	-	56,86	57,31	58,26	58,66	-	10	10	10	10
Ternate	75,81	76,69	77,15	77,64	77,80	1	1	1	1	1
Tidore Kepulauan	65,42	66,25	66,76	67,45	68,37	2	2	2	2	2
Maluku Utara	63,93	64,78	65,18	65,91	66,63	27	27	27	27	27

Keterangan: Peringkat kabupaten/kota berdasarkan jumlah kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara, sedangkan peringkat provinsi berdasarkan jumlah provinsi di Indonesia

Komponen Pembentuk IPM Kabupaten/Kota

Kabupaten/Kota	AHH (tahun)		HLS (tahun)		RLS (tahun)		Pengeluaran per Kapita Disesuaikan (RP 000)	
	2015	2016	2015	2016	2015	2016	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Halmahera Barat	65,35	65,45	12,61	13,05	7,77	7,86	6 889	7 076
Halmahera Tengah	62,40	62,60	12,29	12,70	7,85	8,14	7 359	7 481
Kepulauan Sula	62,39	62,50	11,83	12,23	7,95	7,96	6 545	6 741
Halmahera Selatan	65,03	65,11	11,91	12,31	7,15	7,42	6 791	6 894
Halmahera Utara	68,77	68,86	12,69	13,06	8,06	8,35	6 957	7 110
Halmahera Timur	67,49	67,67	12,09	12,48	7,57	7,77	7 411	7 560
Pulau Morotai	65,98	66,13	11,59	11,92	6,84	6,88	5 809	5 888
Pulau Taliabu	61,08	61,20	11,48	11,73	7,41	7,42	6 158	6 208
Ternate	70,07	70,17	15,05	15,06	11,12	11,13	12 529	12 643
Tidore Kepulauan	68,43	68,54	13,27	13,74	8,91	9,11	7 631	7 772
Maluku Utara	67,44	67,51	13,10	13,45	8,37	8,52	7 423	7 545

- Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- IPM diperkenalkan oleh UNDP pada tahun 1990 dan dipublikasikan secara berkala dalam laporan tahunan *Human Development Report* (HDR).
- IPM dibentuk oleh 3 (tiga) dimensi dasar, yaitu: 1) Umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*); 2) Pengetahuan (*knowledge*); dan 3) Standar hidup layak (*decent standard of living*).
- IPM dihitung sebagai rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran.
- Angka Harapan Hidup saat Lahir (AHH) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.
- Rata-rata Lama Sekolah (RLS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.
- Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang.
- Pengeluaran per kapita yang disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*Purchasing Power Parity - PPP*).

- Persamaan IPM dapat ditulis sebagai berikut:

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} \times I_{pendidikan} \times I_{pengeluaran}} \times 100$$

dimana:

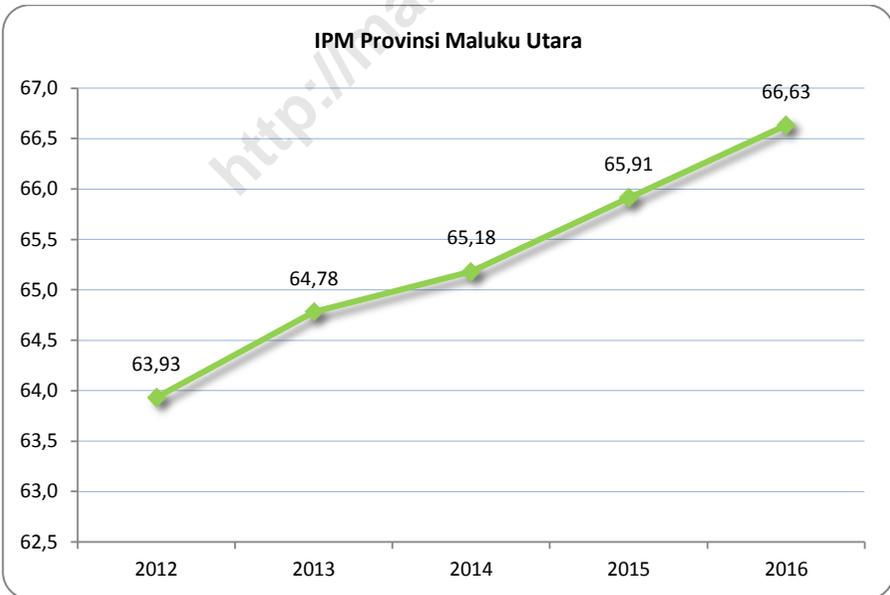
$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

$$I_{pengeluaran} = \frac{\ln(pengeluaran) - \ln(pengeluaran_{min})}{\ln(pengeluaran_{maks}) - \ln(pengeluaran_{min})}$$



INDEKS PEMBANGUNAN GENDER

Indeks Pembangunan Gender Provinsi Maluku Utara

Tahun	Indeks Pembangunan Gender
(1)	(2)
2010	85,29
2011	85,31
2012	87,06
2013	87,96
2014	88,79
2015	88,86

- Indeks Pembangunan Gender (IPG) adalah indikator komposit untuk mengukur dimensi yang sama dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), dengan memperhitungkan capaian berdasarkan gender.
- Sebelum menghitung IPG, dihitung terlebih dahulu pencapaian yang disetarakan dengan tingkat pencapaian yang merata (X_{ede}).
- Cara penghitungan IPG:

$$IPG = \frac{X_{ede(1)} + X_{ede(2)} + I_{inc-dis}}{3}$$

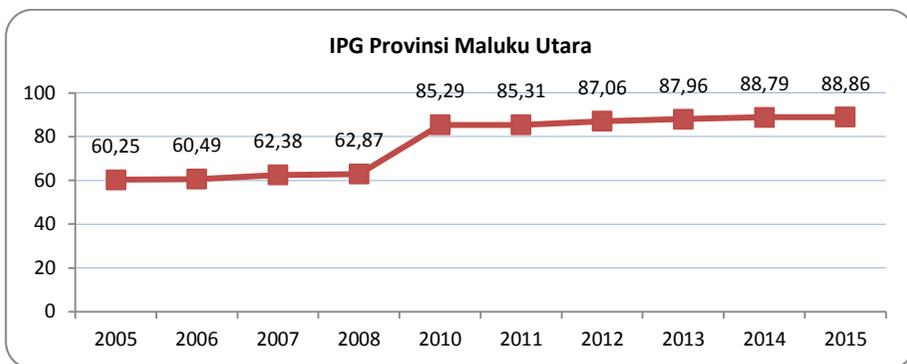
$$X_{ede} = \left(P_f X_f^{(1-\epsilon)} + P_m X_m^{(1-\epsilon)} \right)^{1/(1-\epsilon)}$$

dimana:

$X_{ede(1)} = X_{ede}$ untuk harapan hidup

$X_{ede(2)} = X_{ede}$ untuk pendidikan

$I_{inc-dis}$ = Indeks distribusi pendapatan



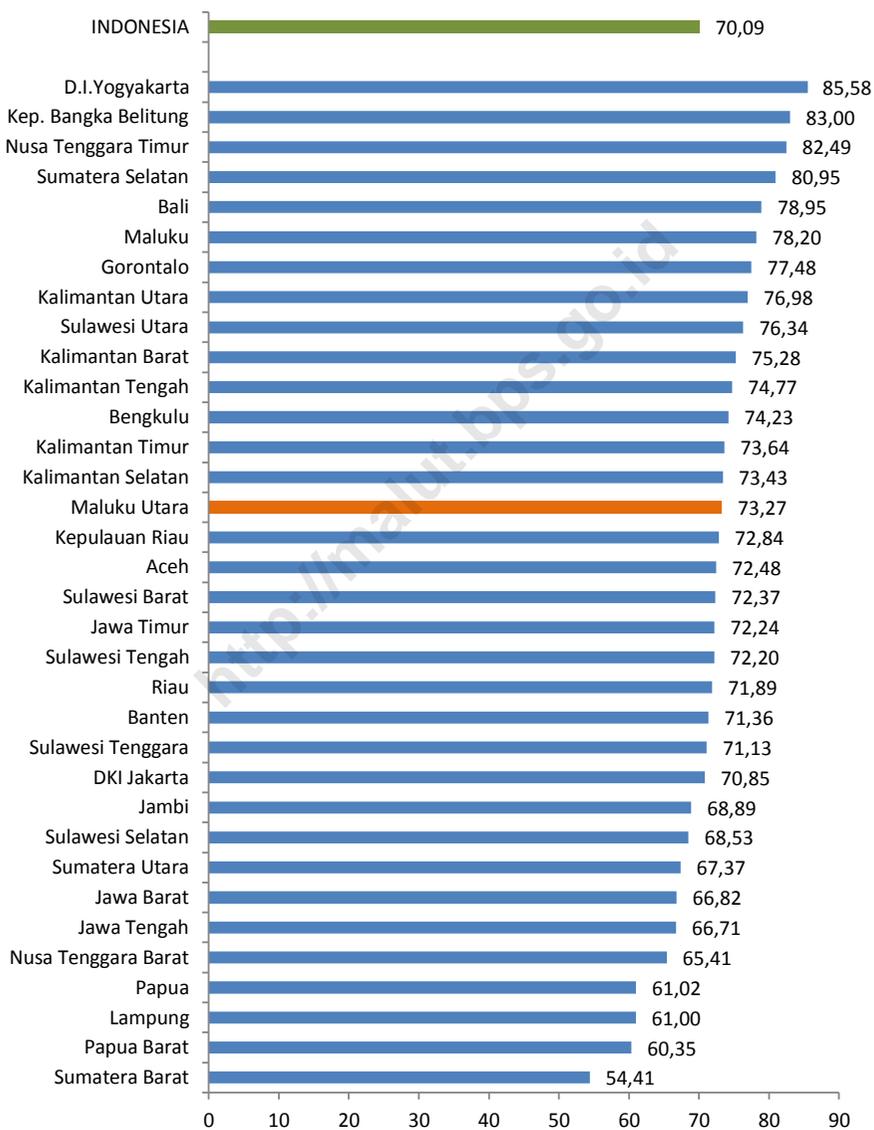
INDEKS DEMOKRASI INDONESIA

Aspek dan Capaian Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Maluku Utara

Aspek Demokrasi	Capaian 2011	Capaian 2012	Capaian 2013	Capaian 2014	Capaian 2015	Capaian 2016
(1)	(2)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I. Kebebasan Sipil	90,04	88,15	83,67	76,90	73,53	92,27
II. Hak-Hak Politik	32,61	50,13	48,94	60,61	61,00	61,79
III. Lembaga Demokrasi	62,56	66,55	63,40	68,16	47,25	67,59
Indeks Keseluruhan	59,17	66,83	64,06	67,90	61,52	73,27

- Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah angka-angka yang menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di seluruh provinsi di Indonesia berdasarkan beberapa aspek tertentu dari demokrasi.
- Aspek demokrasi yang digunakan dalam penyusunan IDI adalah:
 1. Kebebasan sipil (*civil liberties*)
 2. Hak-hak politik (*political rights*)
 3. Lembaga-lembaga demokrasi (*institution of democracy*)
- Tiga aspek demokrasi tersebut terbagi menjadi 11 variabel yang terbagi lagi menjadi 28 indikator.
- Manfaat IDI yaitu:
 1. Secara akademis dapat menunjukkan tingkat perkembangan demokrasi di setiap provinsi di Indonesia.
 2. Data-data yang disampaikan oleh IDI mampu menunjukkan aspek atau variabel atau indikator mana saja yang tidak atau kurang berkembang di sebuah provinsi sehingga dapat diketahui hal-hal apa saja yang perlu dilakukan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan perkembangan demokrasi di provinsi bersangkutan.
 3. Data-data yang disampaikan oleh IDI berguna bagi pemerintah daerah provinsi dan masyarakatnya untuk mengevaluasi diri sendiri dalam melaksanakan demokrasi dan melakukan perbaikan-perbaikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokrasi.

Indeks Demokrasi Indonesia 2016 Menurut Peringkat



DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI MALUKU UTARA**

Jl. Stadion No 65, Ternate

Telp: (0921) 3127878, Fax: (0921) 3126301

Homepage: <http://malut.bps.go.id>, Email: malut@bps.go.id